

**ANALISIS KETIMPANGAN PENGELUARAN
ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT PROVINSI RIAU**

Rita Yani Iyan, Syafril Basri, dan Ando Fahda Aulia

Prodi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Hasil pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diterima secara merata oleh semua kelompok lapisan masyarakat. Dilihat dari potret kemiskinan, dampak pertumbuhan tersebut memberikan warna yang sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui keragaan pengeluaran makanan di Provinsi Riau, (ii) mengetahui keragaan pengeluaran bukan makanan di Provinsi Riau (iii) mengetahui ketimpangan pengeluaran antar kelompok masyarakat di Provinsi Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran makanan pada masyarakat perkotaan sebesar 46,76% lebih rendah dari masyarakat pedesaan sebesar 56,87%. Namun demikian, konsumsi makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih proporsinya masih relatif tinggi baik di perkotaan maupun dipedesaan. Konsumsi Makanan dan Minuman Jadi pada masyarakat perkotaan sebesar 11,60%, Tembakau dan Sirih sebesar 6,39% dari total pengeluaran. Sedangkan di pedesaan proporsi konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar 8,04%, Tembakau dan Sirih sebesar 8,92%. Ini menugindikasikan bahwa kesadaran untuk pola hidup sehat masih rendah ditengah masyarakat Provinsi Riau.

Pengeluaran perkapita masyarakat perkotaan yang lebih tinggi daripada pedesaan berdampak pada proporsi pengeluaran bukan makanan masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Pada tahun 2014 proporsi pengeluaran bukan makanan masyarakat perkotaan sebesar 53,26% sedangkan masyarakat pedesaan sebesar 43,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan yang terdapat di Provinsi Riau.

Tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Provinsi Riau cenderung menunjukkan peningkatan. Indeks gini ratio Provinsi Riau pada tahun 1996 sebesar 0,300 dengan tingkat laju pertumbuhan ketimpangan setiap tahun rata-rata sebesar 3,55% sehingga pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 0,374.

Dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat pada Provinsi tetangga di Sumatera, tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Provinsi Riau masih relatif lebih tinggi.

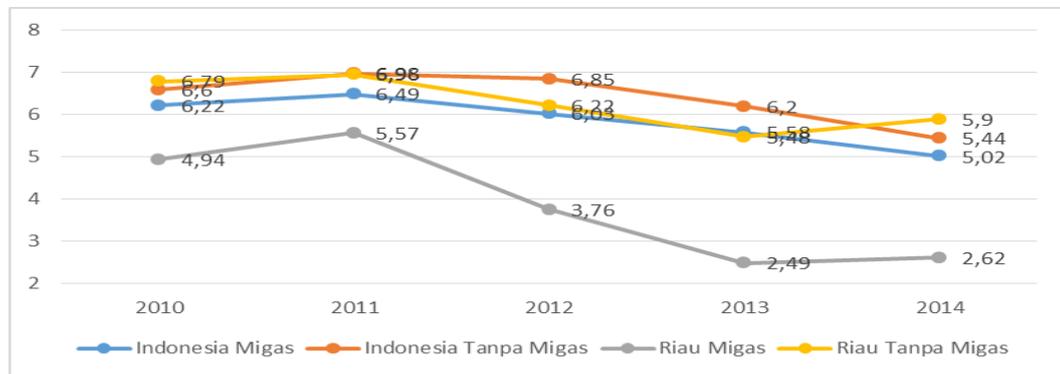
PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk dan kemiskinan merupakan topik yang menjadi bahasan dalam ekonomi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi didewakan sebagai tujuan pembangunan yang selalu harus dikejar-kejar dan diutamakan. Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun sangat sulit untuk diwujudkan bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melakukan dan berhak menikmati hasil-hasilnya yaitu kalangan kaya raya yang minoritas, ataukah mayoritas rakyat yang miskin.

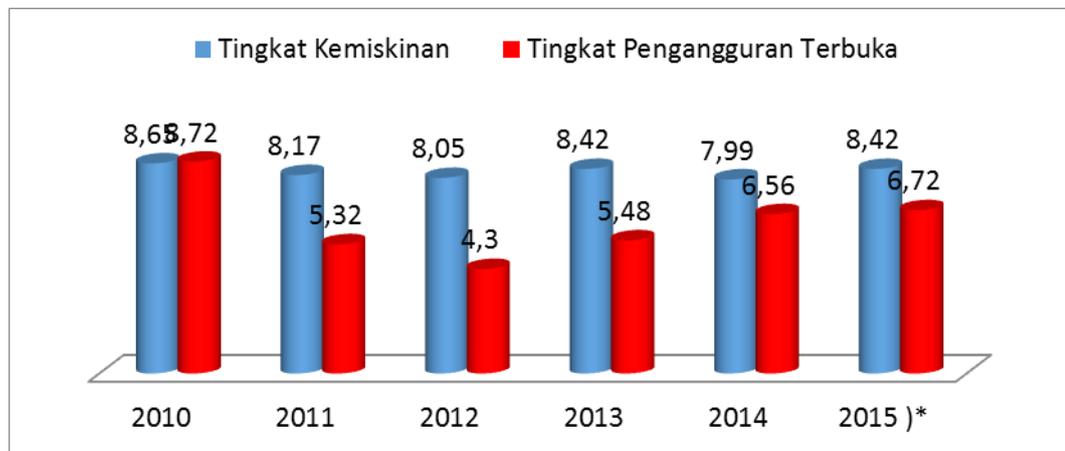
Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain. Antara tahun 2003 hingga 2010, bagian 10 persen terkaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6% per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40% masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun. Hal ini mengakibatkan tingkat koefisien Gini naik pesat dalam 15 tahun naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013. Dalam rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menurunkan tingkat koefisien Gini, dari 41 menjadi 36 pada tahun 2019 (Bank Dunia, 2015).

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan wilayah yang cukup pesat. Pada tahun 2014 ekonomi Riau tanpa migas tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,9%. Walaupun pertumbuhan tanpa migas diatas nasional, pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas berada dibawah nasional yaitu 2,62%. Dari sisi penawaran pertumbuhan sebagai akibat adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi berupa upah, gaji, sewa, bunga dan keuntungan. Ketidak-seimbangan kepemilikan faktor produksi dalam masyarakat dapat mengakibatkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Gambar 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau Tahun 2010-2014 dengan Migas dan Tanpa Migas (Bappeda Riau, 2015) Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah klasik dan mejadi topik yang masih menarik dalam setiap periode waktu. Tingkat pengangguran Riau pada tahun 2012 sebesar 8,05% dan meningkat menjadi 8,42% ditahun 2013. Tingkat kemiskinan yang cenderung meningkat juga diikuti oleh tingkat pengangguran yang meningkat pula, dimana pada tahun 2012 sebesar 4,3% meningkat menjadi sebesar 5,48% ditahun 2013. Walaupun ditahun 2014 tingkat kemiskinan Riau turun menjadi sebesar 7,99% namun tidak demikian dengan tingkat pengangguran yang meningkat menjadi sebesar 6,56%. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung meningkat di Provinsi Riau dikhawatirkan dapat menyebabkan jurang ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin lebar.



Gambar 2 : Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau Tahun 2010-2015 (Sumber : Bappeda Prov. Riau, 2015)



Pengeluaran Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin membaik yang ditunjukkan dengan pangsa pengeluaran pangan yang semakin kecil. Konsumsi protein masyarakat sudah melebihi dari yang dianjurkan, sebaliknya untuk konsumsi protein. Pola konsumsi pangan masyarakat sudah semakin beragam dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin besar. Namun untuk menuju pola pangan PPH, konsumsi beras harus dikurangi, sebaliknya untuk umbi-umbian, pangan hewani dan sayur+buah masih perlu ditingkatkan secara signifikan (Ariani, 2010).

Pangan pokok sebagai sumber karbohidrat berasal dari jenis padi-padian dan umbi-umbian. Jenis yang dikonsumsi adalah beras, jagung, ketela rambat, singkong dan kentang. Jenis pangan pokok ini sangat mudah ditemui dan dijual di pasar-pasar tradisional. Hasil penelitian Wida R (2015) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran sebesar 65,32 % dan proporsi pengeluaran non pangan terhadap total pengeluaran sebesar 34,68 %. Proporsi pengeluaran pangan yang lebih besar daripada proporsi pengeluaran untuk konsumsi non pangan menunjukkan bahwa dalam kondisi keterbatasan pendapatan pemenuhan kebutuhan makanan didahulukan daripada kebutuhan lain. Pangan pokok rumah tangga pra sejahtera sebesar 75,56% mengkonsumsi beras dan 12,22 % mengkonsumsi nasi jagung.

Kebiasaan makan masyarakat dipengaruhi oleh cara mendapatkan sumber pangan, pemilihan bahan makanan, penyusunan menu makan sehari-hari, pengolahan dan penyajian makanan, pendistribusian makanan, frekuensi makan sehari-hari, tabu makanan, dan nilai sosial makan. Pola konsumsi makan masyarakat terdiri dari makanan pokok yaitu nasi jagung dan hidangan pelengkap berupa lauk pauk dan sayur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi makan masyarakat adalah faktor geografis, faktor budaya, faktor pengetahuan ibu rumah tangga, dan faktor pendapatan, dan pekerjaan keluarga. (Margareta dan Purwidiani, 2014)

Menurut Mufidah (2012), *Fastfood* menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat perkotaan yang sibuk dengan aktifitasnya sehingga tidak sempat memasak dan hampir tidak memiliki waktu untuk makan dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Dengan segala kemudahan serta fasilitas yang ada di dalam mall apalagi dengan kehadiran *foodcourt* sepertinya bisa mengisi kehidupan mereka yang menginginkan sesuatu yang serba cepat, instan dan lengkap. Dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, saat makan cenderung dilakukan di rumah, di mana makanan yang disajikan merupakan hasil dari olahan sendiri (ibu). Pola konsumsi pada keluarga di Surabaya disebabkan faktor lingkungan; baik itu dari tingkat pendapatan, pendidikan, pengalaman, status sosial serta dari adanya sikap gengsi agar kedudukannya di dalam masyarakat bisa disejajarkan dengan yang lainnya.

Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Bank Dunia (2015) paling tidak terdapat empat penyebab ketimpangan, yaitu :

- Ketimpangan peluang. Nasib anak dari keluarga miskin terpengaruh oleh beberapa hal utama, yaitu tempat mereka lahir atau pendidikan orang tua mereka. Awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya. Setidaknya sepertiga ketimpangan diakibatkan faktor faktor di luar kendali seseorang individu.
- Ketimpangan pasar kerja. Pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil.
- Konsentrasi kekayaan. Kaum elit memiliki aset keuangan, seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan di masa depan.
- Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Saat terjadi goncang-an, masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak, menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk adalah :

- Memperbaiki layanan umum. Kunci bagi generasi berikut terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, camat, dan kabupaten, karena hal ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana bagi semua masyarakat.
- Memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat dan beasiswa pendidikan.
- Menambah peluang pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja.
- Menyediakan lapangan kerja yang lebih baik.
- Menggunakan pajak dan belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan.
- Meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan.

Dukungan masyarakat cukup kuat untuk adanya kebijakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Lebih dari setengah responden survei berpendapat kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali seseorang, misalnya latar belakang mereka atau pengalaman buruk. Hampir setengah dari seluruh responden mendukung program perlindungan sosial sebagai tindakan kebijakan yang penting. Penelitian Taryono dan Ekwarso (2012) menunjukkan hasil perhitungan indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat pada beberapa daerah di wilayah Riau Pesisir ketimpangan-nya dalam kategori sedang.

Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketidakadaan makanan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. (Syawie, 2011).

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa Kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. (Purwanto, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan (Rusdarti dan Sebayang, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya harus disadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Terdapat 3 pendekatan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. (Prishardoyo, 2008). Selanjutnya agar terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan menurut Soesilowati (2008) berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk perlu menjadi pertimbangan, karena jika suatu kenaikan pendapatan nyata yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka akan terjadi kemunduran ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Meningkatnya konsumsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengalami kenaikan. Demikian juga dengan perkembangan investasi yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun naik dan sebaliknya.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah juga turut memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Shandra, 2012). Dari ketiga faktor tersebut konsumsi masih memegang peranan besar terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan investasi swasta peranannya masih relative lebih besar daripada investasi pemerintah.

Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja melainkan juga harus berkualitas. Dengan demikian, sasaran dan target-target pembangunan menjadi tidak hanya sekedar untuk peningkatan pendapatan, melainkan juga harus mampu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa faktor pendorong utama pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas antara lain investasi *human capital* yang cukup dan berkelanjutan serta penguasaan penggunaan teknologi. Selain itu, harus ada kesinergian antara peran dan potensi modal sosial yang dimiliki. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, adanya transformasi dari masyarakat yang terbelenggu dalam keterbelakangan (*vicious circle*) menjadi mampu menuju masyarakat yang “lebih maju”. (Prasetyo, 2008).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, dan perusahaan semakin banyak. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. (Barika, 2012).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah di Provinsi Riau. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari perkembangan penduduk Provinsi Riau, persentase pengeluaran makan penduduk dalam sebulan menurut kelompok pengeluaran, perkembangan data penduduk miskin, PDRB dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sangat terkait dengan bidang ilmu ekonomi pembangunan. Ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk dihitung dengan formulasi indeks gini ratio sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

Dimana :

Pi : persentase rumahtangga atau pen-duduk pada kelas ke-i

Qi : persentase kumulatif total pend-apatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung indeks gini tersebut dipilah menurut jenis pengeluaran makanan dan non makanan. Selanjutnya untuk tingkat ketimpangan menurut kelompok penduduk miskin digunakan dasar batas pendapatan penduduk yang digolongkan penduduk miskin sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh BPS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keragaan Pengeluaran Makanan

Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin menurun proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Setiap rumah tangga akan memiliki prioritas pengeluaran dari setiap pendapatan yang dimiliki. Sebelum memenuhi kebutuhan bukan makanan, pada umumnya rumah tangga akan memprioritaskan pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Setelah terpenuhinya kebutuhan makanan, barulah kemudian rumah tangga akan memenuhi kebutuhan untuk bukan makanan. Jenis pengeluaran makanan antara lain dikelompokkan ke dalam padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain-lain.

Pengeluaran masyarakat di Provinsi Riau sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pada tahun 2014 proporsi pengeluaran makanan mencapai sebesar 51,81%. Sebagian besar pengeluaran makanan tersebut dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar 9,79%, tembakau dan sirih sebesar 7,68%, padi-padian sebesar 7,57%, dan ikan sebesar 6,75%. Jenis pengeluaran makanan dengan proporsi pengeluaran terendah antara lain seperti umbi-umbian sebesar 0,54%, kacang-kacangan sebesar 0,88%, bumbu-bumbuan sebesar 0,91%, dan konsumsi lainnya sebesar 0,95%.

Secara umum hubungan antara tingkat pengeluaran perkapita dengan proporsi pengeluaran makanan pada masyarakat di Provinsi Riau memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita masyarakat, maka akan semakin rendah proporsi pengeluarannya. Pada golongan pengeluaran perkapita terendah yaitu Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 199.999 proporsi pengeluaran makanan sebesar 66,40% dan relatif meningkat pada golongan pengeluaran Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 299.999 dimana proporsi pengeluaran makanan menjadi sebesar 69,15%.

Namun pada golongan pengeluaran mulai Rp. 300.000 ke atas, golongan pengeluaran perkapita yang meningkat diikuti oleh proporsi pengeluaran makanan yang cenderung menurun. Pada golongan pengeluaran Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 499.999 proporsi pengeluaran makanan masyarakat di Provinsi Riau sebesar 65,67% dan terus menurun sampai dengan pada golongan pengeluaran perkapita pengeluaran tertinggi yaitu diatas Rp. 1.000.000 proporsi pengeluaran konsumsi turun menjadi sebesar 43,50%

Tabel 1 : Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan pada Wilayah Perkotaan + Pedesaan di Provinsi Riau, 2014

Kabupaten/Kota	Golongan pengeluaran per kapita per bulan						Rata-rata Perkapita
	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	>= 1.000.000	
1. Padi-padian	29,47	21,57	13,61	10,86	8,85	4,47	7,57
2. Umbi-umbian	0,24	0,59	0,77	0,68	0,64	0,41	0,54
3. Ikan	4,35	8,59	9,28	7,78	6,83	5,01	6,35
4. Daging	1,57	1,15	1,54	2,09	2,59	2,27	2,20
5. Telur dan Susu	0,96	3,04	3,12	3,46	3,78	3,34	3,41
6. Sayur-sayuran	7,14	7,43	7,23	6,58	5,79	3,39	4,86
7. Kacang-kacangan	0,88	1,08	1,09	1,1	1,12	0,69	0,88
8. Buah-buahan	-	1,77	2,56	2,8	3,11	2,93	2,88
9. Minyak dan Lemak	4,89	3,49	3,7	2,79	2,41	1,41	2,11
10. Bahan Minuman	4,04	3,52	2,66	2,34	2,07	1,23	1,76
11. Bumbu-bumbuan	1,19	1,44	1,45	1,19	1,05	0,65	0,91
12. Konsumsi Lainnya	1,16	1,52	1,2	1,19	1,14	0,75	0,95
13. Makanan dan Minuman Jadi	6,1	5,89	8,46	8,68	8,87	10,82	9,79
14. Tembakau dan Sirih	4,41	8,08	9,02	9,79	9,26	6,13	7,68
Jumlah Makanan	66,40	69,15	65,67	61,33	57,49	43,50	51,88

Sumber : BPS, 2015

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka data pendapatan dalam penelitian ini diproxykan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Menurut BPS (2015), tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya konsumsi/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang bersangkutan.

Peningkatan konsumsi/pengeluaran rumah tangga, terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Di Provinsi Riau sebanyak 0,09% penduduknya memiliki golongan pengeluaran perkapita antara Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 199.999. Dilihat menurut kabupaten/kota, proporsi penduduk tertinggi yang berada pada golongan pengeluaran perkapita ini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 0,42% dan Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 0,42%. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kampar sebesar 0,15% dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,39%. Pada golongan pengeluaran perkapita antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 299.999 di Provinsi Riau dimiliki oleh 2,32% penduduknya. Daerah dengan proporsi penduduk diatas Provinsi Riau pada golongan pengeluaran perkapita ini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 7,72%, Indragiri Hilir sebanyak 4,30%, dan Rokan Hilir sebanyak 4,03%. Sedangkan daerah dengan proporsi penduduknya dibawah Provinsi Riau pada golongan pengeluaran ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 1,93%, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,99%, Kabupaten Pelalawan sebesar 1,62%, Kabupaten Siak sebesar 1,75%, Kabupaten Kampar sebesar 1,91%, Rokan Hulu sebesar 2,27%, Kota Pekanbaru dan Dumai masing-masing sebesar 0,43% dan 1,42%.

Pada golongan pengeluaran perkapita tertinggi yaitu diatas Rp. 1.000.000 di Provinsi Riau dimiliki oleh 27,45% penduduknya. Daerah dengan proporsi penduduk diatas Provinsi Riau pada golongan pengeluaran perkapita ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 30,22%, Pelalawan sebesar 41,27%, Kota Pekanbaru sebesar 53,99% dan Kota Dumai sebesar 31,44%.

Tabel 2 : Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Pada Wilayah Perkotaan + Pedesaan Se Bulan di Provinsi Riau Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Golongan pengeluaran per kapita per bulan						Jumlah
	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	>= 1.000.000	
Kuantan Singingi	0,00	1,93	22,10	23,62	22,13	30,22	100,00
Indragiri Hulu	0,42	1,99	23,89	32,73	22,13	18,84	100,00
Indragiri Hilir	0,00	4,30	29,85	29,06	17,59	19,20	100,00
Pelalawan	0,00	1,62	14,20	22,14	20,68	41,37	100,00
Siak	0,00	1,75	19,71	27,36	22,93	28,26	100,00
Kampar	0,15	1,91	32,90	30,11	17,13	17,81	100,00
Rokan Hulu	0,39	2,27	29,25	36,66	15,81	15,62	100,00
Bengkalis	0,00	2,02	24,34	31,98	14,30	27,37	100,00
Rokan Hilir	0,00	4,03	33,69	35,01	12,60	14,67	100,00
Kepulauan Meranti	0,42	7,72	38,33	28,04	14,55	10,94	100,00
Kota Pekanbaru	0,00	0,43	14,11	19,99	11,49	53,99	100,00
Kota Dumai	0,00	1,42	22,62	27,21	17,30	31,44	100,00
Provinsi Riau	0,09	2,32	25,00	28,57	16,56	27,45	100,00

Sumber : BPS, 2015

Keragaan Pengeluaran Bukan Makanan

Pada masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Riau rata-rata sebesar 48,12% untuk memenuhi pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran bukan makanan ini terutama diprioritaskan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 19,48%, prioritas berikutnya untuk pengeluaran bukan makanan adalah untuk pengeluaran aneka barang dan jasa sebesar 18,41%. Pakaian, alas kaki dan penutup kepala sebesar 3,94%, barang yang tahan lama sebesar 3,24%. Sedangkan sisanya sebesar 3,05% dialokasikan untuk pengeluaran pajak dan premi asuransi sebesar 1,73% dan untuk pengeluaran keperluan pesta dan upacara sebesar 1,32%.

Dilihat dari golongan pengeluaran dan proporsi pengeluaran untuk bukan makanan menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran meningkat, konsumsi untuk bukan makanan juga mengalami peningkatan. Di tahun 2014, golongan pengeluaran terendah adalah Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 199.999 dengan proporsi pengeluaran untuk bukan makanan sebesar 33,60% dan pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi lagi yaitu diatas Rp. 1.000.000, proporsi pengeluaran untuk bukan makanan juga meningkat menjadi sebesar 56,50%.

Variasi proporsi pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga antar golongan pengeluaran relatif lebih tetap, namun variasi proporsi pengeluaran pada aneka barang dan jasa antar golongan pengeluaran menunjukkan perbedaan yang relatif berbeda. Demikian juga variasi pada pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala proporsi pengeluarannya pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi menjadi semakin lebih besar.

Tabel 3 : Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Bukan Makanan pada Wilayah Perkotaan + Pedesaan di Provinsi Riau, 2014

Kabupaten/Kota	Golongan pengeluaran per kapita per bulan						Rata-rata Perkapita
	150.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	>= 1.000.000	
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	19,87	17,27	17,62	19,21	19,72	19,94	19,48
2. Aneka Barang dan Jasa	12,57	11,78	13,48	14,74	15,88	21,68	18,41
Barang & Jasa	7,75	7,79	9,31	10,27	11,16	14,18	12,34
Pendidikan	1,20	1,04	1,30	1,56	2,08	3,05	2,39
Kesehatan	3,62	2,96	2,87	2,91	2,64	4,45	3,67
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	0,49	1,00	2,02	2,75	3,6	4,94	3,94
4. Barang yang Tahan Lama	-	0,27	0,38	0,75	1,6	5,31	3,24
5. Pajak dan Premi Asuransi	0,67	0,35	0,69	0,9	1,28	2,41	1,73
6. Keperluan Pesta dan Upacara	-	0,17	0,14	0,33	0,44	2,22	1,32
Jumlah Bukan Makanan	33,60	30,85	34,33	38,67	42,51	56,50	48,12

Sumber : BPS, 2015

Ketimpangan Pengeluaran Antar Kelompok Masyarakat

Berdasarkan data distribusi persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita se bulan di Provinsi Riau maka dapat diketahui besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.188.442 orang. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada golongan pengeluaran antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 750.000 sebanyak 1.768.038 orang atau 28,57%. Sedangkan golongan pengeluaran dengan jumlah penduduk terendah berada pada golongan pengeluaran Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 199.999 sebanyak 5.570 orang atau 0,09%.

Diketuainya jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran dan nilai tengah dari setiap golongan pengeluaran, maka dapat diketahui jumlah pengeluaran pada setiap golongan pengeluaran. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa 0,9% penduduk pada golongan pengeluaran terendah di Provinsi Riau menguasai sebesar 0,01% dari total pengeluaran dan pada golongan pengeluaran tertinggi dinikmati oleh 27,45% penduduk dengan menguasai sebesar 71,31% dari total pengeluaran. Pada golongan pengeluaran antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 299.999 dinikmati oleh 2,33% penduduk yang menguasai 0,39% dari total pengeluaran. Kemudian pada golongan pendapatan Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 499.999 dinikmati oleh 25,00% penduduk yang menguasai 6,68% dari total pengeluaran. Pada golongan pengeluaran kedua tertinggi antara Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 999.999 dinikmati oleh 16,56% penduduk yang menguasai 9,68% dari total pengeluaran.

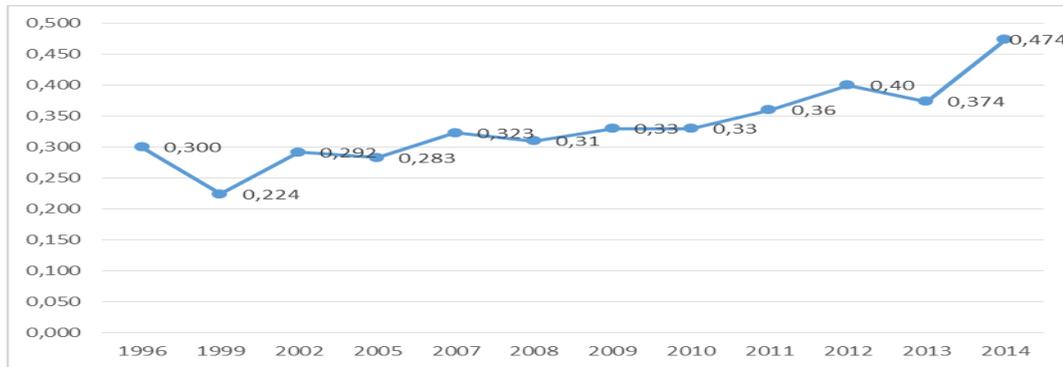
Tabel 4 : Distribusi Persentase Penduduk dan Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran di Provinsi Riau tahun 2014

GOLONGAN PENGELUARAN	Penduduk	%	Pengeluaran	%
<150.000	0	0,00	0,00	0,00
150.000 - 199.999	5.570	0,09	15.749,96	0,01
200.000 - 299.999	144.191	2,33	582.498,84	0,39
300.000 - 499.999	1.547.111	25,00	9.999.987,50	6,68
500.000 - 749.999	1.768.038	28,57	17.856.235,72	11,93
750.000 - 999.999	1.024.806	16,56	14.489.991,72	9,68
>= 1.000.000	1.698.727	27,45	106.760.530,13	71,31
Jumlah	6.188.442	100,00	149.704.993,85	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas (Konsumsi/Pengeluaran), 2015

Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan indeks gini ratio. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks gini Provinsi Riau sebesar 0,474. Angka ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Provinsi Riau di tahun 2014 masih dalam kategori sedang. Namun demikian, apabila dilihat dari trend perkembangan indeks gini Provinsi Riau menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan dari waktu ke waktu terus meningkat. Menjelang akhir orde baru yaitu pada tahun 1996 indeks gini Provinsi Riau sebesar 0,300 dan relatif menurun pada awal era reformasi, dimana tahun 1999 sebesar 0,224. Pada era pemerintahan Megawati Sukarno Putri di tahun 2002 indeks gini Provinsi Riau meningkat menjadi sebesar 0,292 dan terus meningkat hingga pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono indeks gini Provinsi Riau pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 0,374.

Gambar 3 : Perkembangan Indeks Gini Ratio Provinsi Riau Tahun 1996-2014



(Sumber : BPS 1996-2013, hasil perhitungan 2014)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2014 indeks gini Provinsi Riau sebesar 0,474. Sebesar 27,4% penduduk pendapatan terendah hanya menguasai sebesar 7,1%. Sementara itu sebesar 27,5% penduduk berpendapatan tertinggi menguasai sebesar 71,3%. Ini menunjukkan perbedaan pendapatan antara penduduk berpendapatan terendah dengan tertinggi masih sangat timpang.

Tabel 5 : Perhitungan Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2014

GOLONGAN PENGELUARAN	% P	% Y	E% Y	% Y+% Y _{n-1}	% Px (% Y+% Y _{n-1})
<150.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150.000 - 199.999	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
200.000 - 299.999	0,023	0,004	0,004	0,004	0,000
300.000 - 499.999	0,250	0,067	0,071	0,075	0,019
500.000 - 749.999	0,286	0,119	0,190	0,261	0,075
750.000 - 999.999	0,166	0,097	0,287	0,477	0,079
>= 1.000.000	0,275	0,713	1,000	1,287	0,353
Jumlah	1,000	1,000			0,526
Indeks Gini					0,474

Sumber : Diolah dari Susenas (Konsumsi/Pengeluaran), 20015

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum hubungan antara tingkat pengeluaran perkapita dengan proporsi pengeluaran makanan pada masyarakat di Provinsi Riau memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi golongan pengeluaran perkapita masyarakat, menunjukkan semakin rendah proporsi pengeluaran makanannya. Tiga besar proporsi pengeluaran makanan tertinggi adalah untuk makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih, dan padi-padian.

Rata-rata pengeluaran masyarakat Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan non makanan sebesar 48,12%. Pengeluaran non makanan terbesar ini terutama diprioritaskan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, dan pengeluaran aneka barang dan jasa.

Tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Provinsi Riau cenderung menunjukkan peningkatan. Indeks gini ratio Provinsi Riau pada tahun 1996 sebesar 0,300 dengan tingkat laju pertumbuhan ketimpangan setiap tahun rata-rata sebesar 3,55% sehingga pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 0,374.

Dalam upaya mendukung kemandirian pangan, sebaiknya konsumsi terhadap sumber pangan lokal perlu terus untuk ditingkatkan. Gerakan pola hidup sehat melalui konsumsi sumber pangan yang sehat menjadi penting untuk terus digalakkan. Usaha-usaha penciptaan perluasan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah, terutama diwilayah pedesaan perlu untuk lebih ditingkatkan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) harus diikuti dengan kebijakan yang *pro poor* dan *pro job*. Sehingga hasil-hasil pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh para pemilik modal namun juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan membuka kesempatan kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani Mewa, 2010. Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan. *Jurnal Gizi Indon*, 33(1):20-28
- Barika, 2012. Analysis Of Regional Disparities Regencies/Cities In The Province Of Bengkulu Year 2005 – 2009. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* volume : 04. No. 03, Januari - Juni 2012 ISSN: 1979-7338.

- Margareta Dwi, dan Niken Purwidiani, 2014. Kajian tentang pola konsumsi utama masyarakat Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura. *E-jurnal Boga*, Volume 3 Nomor 3 Oktober 2014. Hlm. 86-95.
- Mufidah Nur Lailatul, 2012. Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan (Studi Deskriptif Pemanfaatan *Foodcourt* oleh Keluarga). *Jurnal BioKultur*, Vol.I/No.2/Juli- Desember 2012, hlm. 157-178.
- Prasetyo, Eko P., 2008. The Quality Of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 18-31.
- Prishardoyo, Bambang, 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005 . *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 1-8.
- Purwanto Erwan Agus, 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3 Maret 2007 (295-324)
- Rusdarti dan Sebayang Karolina Lesta. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. <http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1371>
- Shandra, Yosi, 2012. Konsumsi Dan Investasi Serta Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1, April 2012
- Soesilowati, Etty, 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalulintas Di Wilayah Pinggiran dan Kebijakan Yang Ditempuhnya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 9-17.
- Syawie M, 2011. <http://puslit.kemsos.go.id/jurnal-penelitian/114/kemiskinan-dan-kesejahteraan-sosial#sthash.IGE4545T.dpuf>
- Taryono dan Ekwarso, H., 2012. Analisis Pengeluaran Dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II No. 5*, Maret 2012.
- Taryono dan Syapsan. 2011. Dampak Dana Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. *Skim Penelitian Laboratorium LPPM Universitas Riau*.
- Wida R Erlyna, Heru Irianto, dan Choirul Anam, 2015. Kajian identifikasi pangan pokok berbasis kearifan lokal pada rumah tangga pra sejahtera di Jawa Tengah. *Jurnal Agriekonomika*, Volume 4, Nomor 1April, 2015 ISSN 2301-9948 -e ISSN 2407-6260.